

WACANA PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PERINGATAN KE-69 KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA, 15 AGUSTUS 2014

Mohammad Fakhrudin

m_fakhrudin55@yahoo.co.id

Dosen PBSI FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur wacana "Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014" dan penggunaan bahasa Indonesia dalam wacana tersebut. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Teknik yang dominan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan studi pustaka. Sesuai dengan sifat objek penelitian dan data dalam penelitian ini, data yang terkumpul dicatat dalam *form* pencatat data. Hasil analisis disajikan dengan teknik informal. Struktur wacana "Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014" terdiri atas tiga bagian utama, yakni (1) pendahuluan, (2) inti, dan (3) penutup. Ketiga bagian utama itu merupakan satu kesatuan utuh. Dalam pidato itu digunakan bahasa Indonesia yang berfungsi secara cukup efektif sebagai sarana retorika presiden. Tuturan repetisi, hiperbola, eufemisme, tuturan metafora, perumpamaan, personifikasi, dan oksimoron yang digunakan dapat mengungkapkan secara ekspresif pemikiran dan perasaan SBY sebagai presiden, yang berikhtiar memersuasi audiensi. Ada ungkapan-ungkapan yang indah dan santun sehingga audiensi tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga merasakan keindahan bahasa. Tidak terdapat ungkapan-ungkapan kasar, apalagi yang bernada provokatif meskipun digunakan untuk menyatakan ketidaksenangan atau kekecewaan. Dari sudut pandangan ragam wacana, disimpulkan bahwa pidato SBY dapat dikategorikan ke dalam wacana ilmiah populer karena dari aspek penerapan kaidah linguistis bersifat agak longgar. Ada ungkapan asing yang digunakan, tetapi sangat terbatas. Hal ini berarti bahwa SBY berusaha melaksanakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III Pasal 28.

Kata kunci: struktur wacana pidato, bahasa Indonesia wacana pidato kenegaraan

Abstract: The aims of this research is to describe discourse structure of nationality speech of The President of Indonesia in serious of Independent day anniversary of Indonesia 69 th on the 15 th August 2014, it is an interview of using Indonesian language inform of discourse. This research uses qualitative descriptive method. The data of the research is form of language. Then, the results of analysis are presented informally. Descriptive method is used to investigate the use of language itself originally and relatively. To collect the data the researcher conducted an observation and library research. Based on the objects and the data of the research, the data collected presented inform of written form data. Discourse structure of President of Indonesia speech in serious of Indonesia Independent day anniversary consists of three components, namely; (1) introduction, (2) contents, and (3) closing. The three components are one unity. The president's speech is an effective media as rhetorical speech of president. The president SBY used repetition speech, hyperbole, euphemism, metaphorical speech, imagination speech, personification, and oxymoron speech as an expression of his thinking and feeling, it is done to persuade his audients. There is a lovely and polite speech that make audients not only get the information, but also the beauty of language. There is no rude speeches, further there is no provocative speeches even he would like to express his unhappiness and disappointed. Based on the type of discourse, the speech of President SBY is categorized as popular scientific

discourse, it is because the used of linguistics rule is unlimited. There is native speeches used but it is limited. It stated that President SBY wants to implement the rules of Indonesian Republic number twenty-four, it is about nation flag, language, state symbolic, and national anthem, it is stated in chapter three line twenty eight.

Key Words: Discourse structure speech, Indonesian language of discourse of nationality speech

PENDAHULUAN

Penelitian tentang pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (selanjutnya disebut SBY) pernah dilakukan oleh misalnya S. Luhukay (2007) dan Kweldju (2008). S. Luhukay sekadar menerapkan teori Aristoteles pada teks pidato SBY. Berbeda halnya Kweldju. Dia secara rinci menganalisis penggunaan bahasa dalam pidato SBY.

Dari kalangan politikus, baik dari pendukung maupun dari lawan politiknya, pidato kenegaraan SBY pun mendapat tanggapan. Fokus tanggapan mereka terdapat pada isi. Dari kawan politiknya, pidato SBY ditanggapi serbabaik. Dari lawan politiknya, pidato itu ditanggapi serbajelek. Salah satu tanggapan dari lawan politiknya disampaikan oleh Rieke Diyah Pitaloka. Bagi politikus ini, pidato SBY 2013 dianggap sebagai cerita fiksi berbau ilmiah.

Adapun penelitian dengan judul "Wacana Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014" ini (selanjutnya disebut penelitian ini) berfokus pada struktur dan penggunaan bahasa Indonesia dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014. Pemilihan terhadap pidato tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa pidato itu merupakan pidato kenegaraan terakhir SBY. Di samping itu, ada ketegangan yang sangat nyata pada rakyat akibat penolakan Koalisi Merah Putih, yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta, terhadap hasil pilpres yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa pasangan Jokowi-Jk adalah pemenang dalam pilpres tersebut. Penolakan itu dilanjutkan dengan penyampaian gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam kondisi seperti itu, SBY sebagai kepala negara pasti bersikap, berpandangan, atau berharap, setidaknya-tidaknya mengimbau dan imbauan, sikap, pandangan, harapannya itu disampaikan dalam pidato kenegaraan. Dia mempunyai tanggung jawab mengatasi ketegangan itu. Berkenaan dengan itu, dia tentu menggunakan struktur pidato dan bahasa Indonesia tertentu demi terwujudnya maksud itu.

Dalam penelitian ini, ada dua masalah yang diteliti, yaitu (1) bagaimanakah struktur wacana Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69

Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014 dan (2) bagaimanakah penggunaan bahasa Indonesia dalam wacana Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur dan penggunaan bahasa Indonesia dalam Wacana Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014. Temuan dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan berharga, baik untuk penguatan maupun untuk kritik bagi para pemimpin bangsa dalam menyampaikan pidato (juga para konseptor pidato) dalam hal penstrukturan wacana pidato dan penggunaan bahasa Indonesia. Di samping itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat pula menjadi informasi dan/atau inspirasi yang berguna bagi akademisi yang mempunyai perhatian khusus di bidang wacana dan bahasa Indonesia untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif.

A. Struktur Wacana

Menurut strukturnya, wacana lazimnya terdiri atas tiga bagian utama, yaitu (a) pendahuluan, (b) inti, dan (c) penutup (cf. Keraf, 2001: 228-246 dan Ahmadi, 1990: 63). Dalam wacana ilmiah ada kelaziman yang dibakukan dan kelaziman itu diterapkan secara taat asas dalam hal urutan dan isi. Jika ada variasi isi, perbedaan itu disesuaikan dengan gaya selingkung. Pidato kenegaraan, berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, merupakan salah satu macam wacana ilmiah. Di dalamnya disajikan masalah-masalah yang bersifat ilmiah dan dibahas secara ilmiah pula.

Wacana hakikatnya sebuah bangunan utuh. Sebagai bangunan utuh, wacana terdiri atas bagian-bagian yang saling menopang. Sama halnya pada sebuah rumah atau gedung, lazimnya terdapat bagian-bagian inti, yakni fondasi, dinding, dan atap. Analogi wacana dengan rumah ditinjau dari sudut pandangan struktur sebagaimana dipaparkan di atas memperkuat pendapat bahwa pada sebuah wacana pasti ada tema, rincian atau uraian mengenai tema itu, dan penutup. Bahkan, lazimnya pada wacana pasti ada judul dan judul tersebut terdapat pada bagian paling atas/awal karena berfungsi menarik perhatian pembaca/pendengar.

B. Wacana Ilmiah dan Ragam Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi

Dari sudut pandangan keformalannya, ada wacana ilmiah formal atau sering disebut wacana ilmiah dan ada wacana ilmiah populer. Makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan artikel pada jurnal ilmiah merupakan beberapa contoh wacana ilmiah formal dengan sarana tulisan, sedangkan diskusi dan seminar merupakan contoh wacana ilmiah dengan sarana lisan. Menurut Piel (dalam The Liang Gie, 1985:11-17) dan Holmes (1992:12), yang termasuk wacana ilmiah populer dengan sarana tulisan di antaranya adalah artikel yang dimuat di majalah

populer dan surat kabar.

Secara khusus, Moeliono (1981: 65 dan 66) menjelaskan ciri-ciri bahasa pada wacana ilmiah sebagai berikut: (1) menggunakan bentuk kalimat yang mirip dengan proposisi logika, (2) menggunakan kosakata (a) yang tidak mengandung ketaksaan atau ambiguitas, (b) yang menegaskan pemerincian konsep yang bertafsil-tafsil, dan (c) yang dapat melambangkan konsep yang abstrak dan generik, dan (3) menggunakan bahasa yang mengutamakan informasi, bukan imajinasi. Wacana pidato disampaikan untuk mempengaruhi pembaca/pendengar. Itulah sebabnya penulis/pembicara secara sengaja memanfaatkan berbagai sarana. Satu di antara sarana itu adalah bahasa. Bahasa merupakan sarana yang mempunyai kekuatan sangat besar. Kekuatan yang sangat besar itu tentu dimanfaatkan dalam pidato resmi kenegaraan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III Pasal 28 dinyatakan “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.” Dengan demikian, seharusnya, pidato resmi Presiden mematuhi undang-undang tersebut.

Menurut Talbot, Atkinson & Atkinson (2003) dalam Kweldju (2008: 5), bahasa mempunyai peran yang dominan dalam politik. Dalam retorika politik, penulis/pembicara menggunakan piranti kebahasaan seperti aliterasi, repetisi, paralelisme, dan metafora. Dalam retorika juga digunakan ungkapan-ungkapan yang ekspresif dan puitis untuk menjadi lebih menarik, selain menggunakan judul, memanfaatkan generalisasi, pola-pola kutipan dan overleksikalisasi. Sementara itu, menurut Taylor (2007) dalam Kweldju (2008: 5-6) politik itu sendiri berpotongan dengan puisi, dan retorika melalui piranti-piranti kebahasaan seperti metafora, eufimisme, paralelisme, dan narasi ideologis dalam membentuk apa yang benar, indah, dan baik bagi sebuah negara.

Dalam pidato resmi kenegaraan digunakan bahasa yang mempunyai ciri-ciri ragam tinggi. Moeliono (1981: 86) dan Wardhaugh (1992: 91) menyatakan bahwa bahasa ragam tinggi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: bergengsi tinggi, lebih adab, lebih mampu mengungkapkan pikiran yang berbobot dan majemuk, dan lebih indah. Dari sudut pandangan penggunaan bahasa, pidato merupakan salah satu bentuk retorika. Dalam hubungan ini, retorika merupakan seni penggunaan bahasa untuk melakukan persuasi atau seni berbicara di depan khalayak (cf. Leech (1983: 15). Dari sudut pandangan lain, Junus (1989: 39-41) berpendapat bahwa retorika lebih dekat penggunaan bahasa, tetapi lebih menekankan akibat atau tujuan

penggunaan suatu tuturan.

Pendapat Moeliono (1981: 65 dan 66), Moeliono (1981: 86) dan Wardhaugh (1992: 91), Lech (1983: 15), Junus (1989: 39-41), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Bab III Pasal 28, Talbot, Atkinson & Atkinson dalam Kweldju (2008:5) dan Taylor dalam Kweldju (2008: 5-6) sebagaimana dikemukakan di atas dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato SBY yang diteliti ini, dianalisis berdasarkan sudut padangan ragam tinggi bahasa Indonesia dan efek penggunaan bahasa Indonesia itu.

DESAIN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang diteliti berupa bentuk-bentuk bahasa, yakni penggunaan bahasa Indonesia dalam wacana Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014. Di samping itu, analisis data di dalam penelitian ini dilakukan tanpa perhitungan secara statistik. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk mengungkapkan realitas penggunaan bahasa itu secara apa adanya dan bersifat sinkronis.

Sesuai dengan sifat objek penelitian dan data dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik baca catat, yakni dengan membaca secara cermat bahasa Indonesia yang digunakan. Kemudian, data itu dicatat dalam *form* pencatat data.

Instrumen yang digunakan untuk penyediaan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dilengkapi dengan *form* pencatat data. *Form* pencatat data itu disimpan dalam *hard disk*.

Data dalam penelitian ini, yang berupa kutipan-kutipan fragmen pidato yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan menerapkan analisis wacana kritis sebagaimana dikemukakan oleh Fairclough (210: 375-437) karena metode tersebut mempunyai prinsip umum yang sesuai dengan sifat-sifat/tujuan dan isi pidato Presiden SBY, yakni berhubungan erat dengan masalah sosial dan politik dengan segala masalah yang berkaitan dengannya. Pidato tersebut hakikatnya adalah melaksanakan retorika, dan retorika merupakan seni penggunaan bahasa untuk melakukan persuasi atau seni berbicara di depan khalayak (cf. Leech (1983: 15). Dalam hubungan itu, Junus (1989: 39-41), berpendapat bahwa retorika lebih dekat penggunaan bahasa, tetapi lebih menekankan akibat atau tujuan penggunaan suatu tuturan. Dengan demikian,

penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato SBY yang diteliti ini, dianalisis juga berdasarkan sudut padangan ragam tinggi bahasa Indonesia dan efek penggunaan bahasa Indonesia itu. Di samping itu, sesuai dengan objek penelitian, penafsiran juga dilakukan dengan menerapkan teori stilistika sebagaimana dikemukakan oleh Pradopo (1999b: 18-19), Junus (1989: 195), dan Kunta Ratna (2009: 330). Menurut mereka, bahasa dapat digunakan tidak hanya sebagai piranti untuk menyampaikan ide, tetapi juga menciptakan keindahan.

Hasil analisis data dalam penelitian ini dipaparkan dengan metode informal. Dengan metode ini, hasil analisis dipaparkan secara deskriptif khas verbal dengan kata-kata biasa tanpa lambang-lambang sebagaimana dikemukakan oleh Sudaryanto (1993:145).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

Struktur wacana pidato SBY yang diteliti ini (selanjutnya disebut pidato SBY) secara garis besar, terdiri atas tiga bagian utama, yaitu (a) pendahuluan, (b) inti, dan (c) penutup. Namun, secara lengkap, pidato itu diawali dengan judul “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014.”

Bagian pendahuluan pidato SBY tersebut berisi ucapan basmalah, salam pembuka, sapaan kepada audiensi, ucapan rasa syukur, ucapan selamat Idulfitri, dan informasi tentang dua macam pidato yang disampaikan. Isi pendahuluan yang berupa ucapan basmalah, salam pembuka, sapaan kepada audiensi, ucapan rasa syukur, ucapan selamat Idulfitri sesuai dengan kelaziman pejabat Indonesia yang beragama Islam ketika memulai pidato. Malahan, ucapan salam *Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh* yang lazim digunakan oleh umat Islam sering digunakan pula oleh umat non-Islam ketika memulai pidato. Demikian pula halnya ucapan rasa syukur meskipun diungkapkan dengan cara lain misalnya dalam bahasa Indonesia.

Ucapan selamat Idulfitri sesuai dengan situasi aktual pada saat pidato itu disampaikan, yakni Idulfitri. Bahkan, ucapan selamat Idulfitri bagi bangsa Indonesia tidak lagi hanya milik umat Islam, tetapi juga sudah menjadi budaya bangsa. Pejabat Indonesia yang beragama non-Islam pun menggunakan ucapan itu pada saat mengawali pidatonya pada suasana Idulfitri.

Informasi yang berisi dua macam pidato yang disampaikan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mengondisikan perhatian audiensi. Dengan menyimak informasi itu, audiensi terkondisikan sejak awal bahwa pidato yang disampaikan oleh SBY terdiri atas dua macam, yakni (1) Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014 dan (2) Pidato Pengantar RAPBN Tahun

Anggaran 2015 beserta Nota Keuangannya. Malahan, audiensi dapat secara cerdas menduga arah pidato dengan referensi yang dimilikinya. Jika ketika menyimaknya telah ada referensi yang terkait dengan isi pidato itu, audiensi tinggal mencocokkan. Hasilnya, mungkin dari segi cakupan isi sama, mungkin pula berbeda. Jika sama, berarti audiensi tinggal memperhatikan ilustrasi dan/atau data yang disampaikan oleh SBY. Jika cakupan isi yang disampaikan SBY lebih banyak, berarti audiensi memperoleh tambahan materi.

Dalam hubungannya dengan ilustrasi dan/atau data dalam pidato SBY, audiensi dapat secara cerdas mencermati keakuratannya. Sangat mungkin data yang terdapat dalam pidato SBY itu dinilai akurat. Jika demikian halnya, audiensi mendukung isi pidato SBY itu dengan argumen-argumen pendukung yang menguatkan. Mungkin juga sebaliknya; data dalam pidato SBY itu dinilai tidak akurat. Ketidakakuratan data tersebut menyebabkan audiensi menolak dengan argumen-argumen yang melemahkan. Dengan demikian, sesungguhnya penyampaian informasi pada bagian awal pidato yang berisi dua macam pidato itu dapat dimaknai bahwa SBY memberikan kesempatan kepada audiensi untuk mengkritisi isi pidatonya. Hal ini berarti bahwa dia telah siap memperoleh dukungan atau pun kritikan.

Pada bagian inti, SBY menyampaikan berbagai pernyataan, informasi, dan sikap. Namun, dia sering menyapa audiensi dengan sapaan *Saudara-saudara* sebagai usaha menciptakan suasana interaktif. Sapaan itu merupakan salah satu sarana transisi yang digunakan untuk menjembatani peralihan dari gagasan yang satu ke gagasan yang lain. Inti pidato tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

1. Pernyataan

Cukup banyak pernyataan yang disampaikan oleh SBY dalam pidatonya. Secara garis besar, pernyataan tersebut berisi hal-hal sebagai berikut.

a. pengakuan tentang jasa para pendiri negara

Secara eksplisit, dalam (P 5) terdapat pengakuan SBY tentang jasa para pendiri negara RI. Menurut SBY, para pendiri negara RI tidak hanya berjasa bagi bangsa sendiri, tetapi juga bagi bangsa di Asia.

Sebentar lagi, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akan dengan penuh suka cita merayakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sebuah peristiwa yang amat bersejarah. Melalui proklamasi yang sederhana dan singkat, dari Jalan Pegangsaan, para pendiri bangsa mengobarkan suatu revolusi kemerdekaan yang menginspirasi bangsa-bangsa lain, melahirkan Republik besar di Asia, dan membuka sejarah Indonesia modern (P 5).

Pengakuan SBY akan jasa para pendiri negara RI tersebut dikuatkan lagi pada (P 6). Kalimat pertama dalam (P 6) berisi pengakuan SBY bahwa generasi 45 telah sangat berjasa

kepada bangsa dan negara Indonesia. Generasi tersebut disebut sebagai generasi emas yang mengubah nasib bangsa dengan semangat perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan yang luar biasa.

b. pengakuan dan penghargaan terhadap jasa presiden pendahulunya bagi kemajuan bangsa Indonesia

SBY tidak hanya mengakui jasa para pendiri negara RI, tetapi juga mengakui jasa para presiden pendahulunya. Cara yang digunakannya adalah menyebut semua nama presiden pendahulunya, termasuk Megawati, padahal pada pemilihan presiden 2004 dan 2009 Megawati merupakan “rivalnya.”

Dalam kutipan di bawah ini, jelas sekali pengakuan SBY terhadap jasa para presiden pendahulunya.

Semua hal yang kita capai sebagai bangsa sebenarnya bukan monopoli siapapun. Semua itu adalah kulminasi gabungan dari sumbangsih dan kerja keras seluruh generasi, dari era Presiden Soekarno, era Presiden Suharto, era Presiden B.J. Habibie, era Presiden Abdurrachman Wahid, era Presiden Megawati Soekarnoputri, hingga era saya saat ini. Insya Allah, ke depan, akan dilanjutkan di era Presiden Indonesia ke-7 dan Presiden-Presiden berikutnya (P 14).

SBY juga berharap agar presiden-presiden yang menggantikannya pun mengakui dan melanjutkan semua yang telah dirintis dan prestasi yang dicapai para pendahulunya. Hal itu dapat diketahui pada data (P 15).

c. pengakuan akan adanya pengaruh situasi internasional terhadap capaian pelaksanaan agenda pembangunan di Indonesia

Paragraf (76) di bawah ini pun berisi pengakuan SBY bahwa faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia selama kepemimpinannya. Menurut SBY, ikhtiar menjaga persatuan dan kemakmuran Indonesia sangat terbantu apabila situasi internasional kondusif terhadap kepentingan bangsa Indonesia. Namun, dari sisi lain, pengakuan yang demikian menjadi catatan penting sebagai alasan klasik yang menjadi ke-biasaan para pemimpin bangsa Indonesia. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: kapan bangsa Indonesia dipimpin oleh orang yang dengan gagah mengatakan, “Meskipun situasi internasional kurang menguntungkan, bangsa Indonesia sama sekali tidak terpengaruh. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat baik dan kesejahteraan bangsa Indonesia makin dirasakan. Dinamika politik berlangsung sangat sehat.”

Segala upaya kita untuk menjaga persatuan dan kemakmuran Indonesia akan sangat terbantu apabila situasi internasional juga kondusif terhadap kepentingan kita (P 76).

d. informasi

Ada empat informasi yang disampaikan dalam P 8 s.d. 12, yaitu (1) kemajuan yang bermakna yang dialami oleh bangsa Indonesia, (2) titik berat agenda pembangunan: demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, (3) capaian agenda pembangunan penegakan keadilan, dan (4) pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif dan capaian keberhasilannya. Di bawah ini disajikan keempat informasi tersebut dan analisisnya.

1) kemajuan yang bermakna yang dialami oleh bangsa Indonesia

Dalam P 8 SBY mengemukakan capaian di bidang pendidikan. Paragraf itu berisi perkembangan jumlah rakyat yang melek huruf disertai jumlah sekolah, guru, dan siswa. Dijelaskannya dalam paragraf tersebut bahwa pada awal kemerdekaan, sebagian besar penduduk Indonesia buta huruf. Sementara itu, pada saat pidato itu disampaikan, rakyat Indonesia mempunyai sistem pendidikan yang kuat dan luas, yang mencakup lebih dari 200 ribu sekolah, 3 juta guru dan 50 juta siswa.

Dari bangsa yang sewaktu merdeka sebagian besar penduduknya buta huruf, rakyat Indonesia kini mempunyai sistem pendidikan yang kuat dan luas, yang mencakup lebih dari 200 ribu sekolah, 3 juta guru dan 50 juta siswa (P 8).

Untuk menguatkan informasi itu, dalam P 56, 57, 58, dan 61 dipaparkan peningkatan anggaran pada sektor pendidikan, yakni 20% dari APBN, pemanfaatannya secara rinci, dan hasil yang dicapai. Pada intinya, akses dan kualitas pendidikan menjadi titik penting pemanfaatan anggaran. Program yang telah dilaksanakan berkenaan dengan peningkatan anggaran itu terdiri atas tiga macam, yakni (a) bidikmisi P 57, (b) dana abadi untuk program S2 dan S3 P 58, dan (c) afirmasi P 61. Paparan program dan capaiannya itu disertai dengan angka pendukung.

Prestasi dalam olimpiade internasional disajikan pada P 60 dilengkapi dengan angka pendukung. Gerakan nasional rehabilitasi gedung sekolah di seluruh Indonesia yang dipaparkan pada P 62 yang disertai dengan angka pendukung pun berisi penguatan informasi tentang kemajuan bermakna di bidang pendidikan. Sama halnya informasi pada P 64. Dalam paragraf itu disajikan informasi tentang peningkatan jumlah lulusan SLTA yang melanjutkan kuliah disertai dengan angka pendukung.

Hal yang menarik adalah pengakuan tentang rendahnya kualifikasi pendidikan para pekerja. Dinyatakannya bahwa sekitar 49 persen pekerja Indonesia berpendidikan SD. Bahkan, dinyatakan pula dampaknya terhadap mobilitas ekonomi mereka, yakni sangat terbatas dan dampaknya terhadap produktivitas nasional.

Informasi tentang program di bidang pendidikan dan capaiannya tersebut baru merupakan potongan informasi. Dikatakan demikian karena fakta yang dapat ditafsirkan sebagai belum optimalnya capaian pendidikan dengan mudah dapat diketahui oleh masyarakat luas. Misalnya, (a) banyak gedung sekolah rusak dan ambruk, (b) sering terjadi tawur antarpelajar (bahkan antarmahasiswa), (c) banyak siswa dan mahasiswa terjerat kasus narkoba, dan (d) banyak siswa dan mahasiswa melakukan tindak kriminal. Bahkan, perlu pula diteliti korelasi antara tindakan korupsi dan lemahnya penegakan hukum dengan buruknya sistem pendidikan. Juga perlu diteliti, kualitas pendidikan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Informasi mengenai perkembangan posisi ekonomi bangsa Indonesia disajikan dalam P 9. Diinformasikannya bahwa Indonesia telah naik menjadi *middle-income country*, menempati posisi ekonomi ke-16 terbesar dunia. Bahkan, menurut Bank Dunia, Indonesia telah masuk dalam 10 besar ekonomi dunia jika dihitung dari *purchasing power parity*. Informasi itu dapat diketahui melalui kutipan di bawah ini.

Dari bangsa yang tadinya terbelakang di Asia, Indonesia telah naik menjadi *middle-income country*, menempati posisi ekonomi ke-16 terbesar dunia, dan bahkan menurut Bank Dunia telah masuk dalam 10 besar ekonomi dunia jika dihitung dari *purchasing power parity* (P 9).

Status ekonomi sebagaimana dikemukakan dalam P 9 merupakan prestasi menggem-birakan. Pengakuan Bank Dunia tersebut menimbulkan keoptimisan. Lebih-lebih lagi, jika posisi ekonomi yang demikian itu disertai indikator yang dengan mudah dapat dirasakan oleh rakyat, bukan hanya ada dalam pikiran SBY dan para pendukungnya.

Paragraf-paragraf selanjutnya P 10, 11, dan 12 juga berisi capaian “menggembirakan.” Pada intinya, pada P 10 SBY memaparkan pertumbuhan kesejahteraan rakyat Indonesia pada abad ke-21 dibandingkan dengan pertumbuhan kesejahteraan rakyat di Asia. Kutipan di bawah ini mengenai hal tersebut.

Dari bangsa yang seluruh penduduknya miskin di tahun 1945, Indonesia di abad ke-21 mempunyai kelas menengah terbesar di Asia Tenggara – dan salah satu negara dengan pertumbuhan kelas menengah yang tercepat di Asia (P 10).

Informasi sebagaimana terdapat dalam P 10 tidak bersifat tunggal. Dalam paragraf tersebut, diinformasikan bahwa seluruh penduduk Indonesia pada tahun 1945 miskin, tetapi pada abad ke-21 tidak demikian halnya. Bahkan, bangsa Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, baik di tingkat Asia Tenggara maupun di tingkat Asia.

Penguatan isi informasi tersebut disajikan pada paragraf-paragraf lain. Dalam P 43 s.d. 48,

dipaparkan penguatan itu secara rinci dengan angka pendukung: (a) pertumbuhan ekonomi dinyatakan relatif tinggi. Bukti yang menguatkannya adalah pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata pada tahun 2009-2013, yakni 5,9 persen dan dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang demikian lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Jepang pada kurun waktu yang sama.

Dalam P 44 diinformasikan tentang posisi utang luar negeri Indonesia, yakni aman. Informasi dalam paragraf itu pun disertai angka pendukung. Dalam hubungannya dengan IMF, dijelaskan dalam P 45 bahwa Indonesia telah melunasi utangnya empat tahun lebih awal dari jadwal yang disepakati. Prestasi lain yang menumbuhkan prestise adalah ketika menerima *Managing Director IMF*, SBY dapat memberikan masukan mengenai cara mereformasi IMF. Menurut SBY, Indonesia tidak lagi menjadi pasien IMF.

Masih ada dua lagi paragraf yang berisi prestasi di bidang ekonomi. Paragraf (47) digunakan untuk menginformasikan peningkatan anggaran pembangunan yang mencapai Rp1.842,5 triliun. Anggaran itu dinyatakan sebagai anggaran tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Cadangan devisa yang mencapai 110,5 miliar dolar AS pun dijadikan bukti penguat prestasi di bidang ekonomi. Demikian pula halnya nilai investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sementara itu, dalam (p 48) diinformasikan bahwa Indonesia telah menjadi anggota G-20. Hal ini diartikan merupakan bukti bahwa Indonesia telah menjadi salah satu pemain inti dalam ekonomi internasional.

Timbul pertanyaan besar. Jika benar keadaan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam paragraf-paragraf itu, mengapa banyak rakyat Indonesia yang dengan penuh semangat menjadi TKI dan TKW, padahal banyak kasus yang “memilukan.” Dikatakan “memilukan” karena mereka bukannya memperoleh kesejahteraan, melainkan kesengsaraan.

Isi P 12 bersifat menegaskan secara umum tentang capaian pada tiga bidang. Dalam paragraf tersebut SBY menegaskan bahwa setelah hampir 7 dekade merdeka, bangsa Indonesia pada abad ke-21 makin bersatu, makin makmur, dan makin demokratis.

Masih ada lagi pernyataan keberhasilan di bidang politik. Dalam P 24 SBY menyatakan bahwa politik dalam keadaan stabil dan persatuan nasional makin kokoh.

Jika pernyataan tentang keberhasilan di bidang politik itu dicermati berdasarkan indikator yang dikemukakannya pada P 26 dan 27, ada kontradiksi. Dalam kedua paragraf itu, SBY memaparkan indikator demokrasi yang berkualitas baik.

Kemajuan berdemokrasi sebagaimana dipaparkan pada P 11 dan 12 jika dihubungkan

dengan kenyataan, sesungguhnya baru sampai pada kebebasan berpendapat dan bersyarikat. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan pemilihan umum dengan jumlah partai yang banyak. Jika tolok ukur kebebasan berpendapat yang digunakan adalah bebas menyatakan pendapat tanpa ada bingkai akhlakul karimah, paparan pada paragraf itu benar. Rakyat Indonesia telah memiliki kebebasan yang luar biasa dalam menyatakan pendapat. Misalnya, mengkritik presiden pun “boleh” dengan kata-kata kotor; menulis nama SBY pada kerbau juga “boleh.” Dari segi kualitas, kebebasan berpendapat tersebut, bukanlah cermin bangsa beradab tinggi. Masih terkait dengan kemajuan berdemokrasi, jika dicermati dari sudut pandangan lain, kemajuan di bidang demokrasi itu baru sampai pada kuantitas partai peserta pemilihan anggota DPR dari tingkat daerah sampai pusat dan pemilihan bupati/walikota dan gubernur. Dikatakan demikian karena banyak wakil rakyat dan kepala daerah yang dihasilkan melalui kegiatan politik lima tahunan yang disebut “pesta demokrasi” itu terjerat kasus korupsi atau tindak pidana yang lain. Indikator sebagaimana dipaparkan pada P 26 dan 27 belum dicapai secara optimal.

2) titik berat agenda pembangunan: demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat

Untuk memberikan penguatan pada informasi capaian pembangunan pada periode 2009-2014, disampaikan kembali tiga titik berat pembangunan. Pemaparan kembali tiga titik berat agenda pembangunan itu merupakan langkah yang bermanfaat, baik bagi SBY maupun audiensi. Dalam P 16 di bawah ini, dijelaskan mengenai hal itu.

Masih segar dalam ingatan saya, lima tahun lalu, tepat pada tanggal 20 Oktober 2009, saya menyampaikan kebijakan dasar dan program pemerintahan lima tahun ke depan yang dititik beratkan pada tiga agenda utama, yakni pembangunan demokrasi, penegakan keadilan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (P 16).

Paragraf 16 itu mengingatkan kembali audiensi sekaligus membatasi substansi pidato. Bagi SBY, isi paragraf itu menjadi pemandu pidatonya sehingga lebih fokus. Dia dapat menguraikan tema pokok pidatonya lebih rinci dengan data pendukung yang diyakini keakuratannya. Sementara itu, bagi audiensi, penyebutan kembali tiga agenda utama itu pun bermanfaat, yakni sebagai rambu cakupan isi pidato SBY sehingga jika audiensi akan mengritisinya, fokus substansinya jelas.

3) capaian agenda pembangunan penegakan keadilan

Ada delapan paragraf, yakni P 28 s.d. 35 yang digunakan untuk menguraikan capaian agenda pembangunan penegakan keadilan. Di bawah ini disajikan beberapa paragraf sebagai sampel.

Demokrasi yang kita bangun akan sia-sia tanpa adanya keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dari era kolonialisme, era kemerdekaan, era pembangunan, sampai era

reformasi, perjuangan rakyat Indonesia adalah perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal ini secara abadi telah tercantum dalam sila ke-5 dasar negara kita, Pancasila. Kita harus yakin dan percaya, bahwa negara hadir untuk memberikan keadilan -- apakah keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan politik, maupun keadilan hukum. Keadilan untuk semua – *justice for all* – merupakan komitmen moral, sekaligus sebagai agenda kerja pemerintahan yang saya pimpin sejak tahun 2009 hingga 2014 ini (P 28).

Paragraf 28 di atas berisi penalaran pentingnya keadilan menjadi titik berat agenda pembangunan. Dijelaskan melalui K 1 bahwa pembangunan demokrasi menjadi sia-sia jika tidak ada keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Melalui K 2, dikemukakan pentingnya penekanan agenda pembangunan pada penegakan keadilan dari masa ke masa. Audiensi dikondisikan sadar akan hal itu. Agar maksud itu tercapai, dipaparkanlah substansi perjuangan rakyat Indonesia sejak era kolonialisme hingga era reformasi yang dipimpinnya sejak 2004, yakni perjuangan untuk memperoleh keadilan. Sebagai rujukan penalaran SBY, disebutkan sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan melalui K 3. Dalam kalimat-kalimat selanjutnya disampaikan rincian keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengakhiri paragraf itu, ditegaskan bahwa keadilan adalah untuk semua dengan ungkapan *justice for all*.

Setelah penalaran sebagaimana terdapat dalam P 28, isi pidato pada P 29 s.d. 38 merupakan paparan yang bersifat umum yang berfungsi sebagai pengantar rincian yang disajikan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Dalam P 29 dipaparkan perbandingan antara masa lalu dan masa reformasi. Pada masa lalu, politik pernah dijadikan panglima. Kemudian, pada masa berikutnya, ada perubahan, yakni ekonomi menjadi panglima. Namun, pada masa reformasi hukum menjadi panglima. Dengan demikian, para era reformasi, semua warga negara pasti berada dalam jangkauan hukum.

Dalam P 30 s.d. 33, dipaparkan ikhtiar dan capaian penegakan keadilan melalui pemberantasan korupsi. Dijelaskan dalam P 30 bahwa selama 2004-2012, ada 176 izin yang ditandatangani SBY untuk pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat yang diduga melakukan tindakan korupsi dan tindakan pidana lainnya. Dalam kurun waktu 2004-2014, terdapat 277 pejabat negara, baik pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang ditangani KPK. Hal itu dipaparkan dalam P 32. Paragraf 33 berisi penegasan bahwa pemerintahan SBY terus mendukung dan memberikan ruang gerak yang luas bagi KPK untuk memberantas korupsi. Di samping itu, SBY memberikan penghargaan dan menyampaikan harapan kepada semua pihak penegak hukum agar bekerja sama.

Paragraf 35 berisi informasi tentang kelahiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang

bertujuan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu menyewa pengacara untuk menghadapi pengadilan. Dalam P 36 disampaikan pengakuan bahwa reformasi hukum menjadi tantangan yang paling berat. Berkenaan dengan itu, disampaikan harapan agar reformasi hukum terus menjadi prioritas utama.

Penyampaian informasi berupa capaian agenda pembangunan selanjutnya dituangkan dalam P 37 dan 38. Kedua paragraf tersebut berisi penjelasan tentang ikhtiar pemerintah untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan. Dijelaskan bahwa keadilan yang diperjuangkan tidak hanya diukur dari segi hukum, tetapi juga ekonomi dan politik. Oleh karena itu, pemerintah telah membangun wilayah potensial ekonomi di luar pulau Jawa, terutama Aceh dan Papua. Dengan pembangunan di luar pulau Jawa tersebut, diyakini SBY bahwa keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan P 35 s.d. 38 (disajikan dalam Lampiran 2).

Dalam P 39 dan 41, (terdapat dalam Lampiran 2) disajikan pengantar isi paragraf-paragraf selanjutnya. Kebijakan pemerintah yang pro-rakyat yang disajikan pada P 39 merupakan landasan tercapainya agenda pembangunan. Pemulihan ekonomi disajikan pada P 40. Kemudian, pernyataan umum tentang perkembangan dalam pembangunan dipaparkan pada P 41.

Capaian pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat disampaikan secara rinci dalam P 41 dan paragraf-paragraf seterusnya. Dalam P 42 s.d. 48 dipaparkan capaian di bidang ekonomi sebagaimana telah dibahas pada IV.B.1.b.1).

4) pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif dan capaian keberhasilannya

Dalam P 77 SBY menyatakan bahwa Indonesia konsisten dengan pelaksanaan politik luar negeri, yakni bebas aktif dengan terus memperjuangkan terwujudnya keadilan dan perdamaian dunia. Bahkan, dalam K 3 SBY menyatakan bahwa Indonesia telah menjadi kekuatan regional dan sekaligus pemain global yang disegani. Di bawah ini disajikan kutipan yang berisi pernyataan tersebut.

Indonesia telah dan akan terus berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, seraya terus memperjuangkan terwujudnya keadilan dan perdamaian dunia. *Alhamdulillah*, sejak era reformasi, reposisi Indonesia di dunia internasional terus berlangsung. Indonesia telah menjadi kekuatan regional dan sekaligus pemain global yang disegani (P 77).

Usaha memperbanyak kawan dan menghilangkan lawan dituangkan dalam P 78. Secara konkret usaha itu ditempuh dengan membangun kemitraan strategis dengan seluruh negara besar dan sebagian besar *emerging power*. Ikhtiar tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan

perdamaian dunia. Dalam paragraf 21 terdapat informasi mengenai hal itu.

Paragraf 79 s.d. 93, berisi ikhtiar dan capaian konkret secara rinci dengan bukti. Misalnya, ketika ada insiden jatuhnya pesawat MH-17, Indonesia berperan aktif. Dalam hubungannya dengan situasi di Timur Tengah, terutama nasib bangsa Palestina, Indonesia pun tidak berdiam diri. Paragraf selanjutnya yang juga berisi ikhtiar dan capaian konkret pelaksanaan politik luar negeri misalnya adalah P 81.

Paragraf-paragraf selanjutnya, pada dasarnya berisi pelaksanaan dan capaian politik luar negeri. Untuk menutup paparan yang berisi demikian, disajikan P 94 yang bersifat menegaskan bahwa Indonesia telah, sedang, dan terus berupaya memajukan perdamaian dunia, kerja sama internasional, dan berjuang melindungi warga Indonesia di luar negeri.

Perdamaian dunia menjadi pilihan utama Indonesia pada masa kepemimpinan SBY. Dalam pidatonya tidak ada semangat agitasi melawan kesewenang-wenangan negara lain. Tindakan Malaysia (a) mengpernyataan beberapa pulau yang menjadi bagian wilayah Indonesia, (b) mengpernyataan kesenian tradisional reog sebagai kesenian milik Malaysia, (c) menentang penggunaan nama Usman dan Harun sebagai nama kapal perang Indonesia, dan tindakan lainnya yang tidak bersahabat, diselesaikan dengan mengutamakan jalan diplomasi. Demikian pula halnya tindakan pemerintah Australia dan/atau negara lain yang merusak persahabatan, tidak diladeni dengan pernyataan-pernyataan yang berisi mengobarkan api permusuhan.

Paragraf P 83 merupakan sampel yang berisi pilihan utama Indonesia dalam keikutertaannya mengatasi berbagai konflik internasional sebagai wujud nyata politik luar bebas aktif. Dalam P 84, 85, dan 86 pun SBY menyampaikan pilihan utamanya, yakni menciptakan perdamaian dunia. Tindakannya, untuk mewujudkan ikhtiarnya itu, mencapai titik puncaknya ketika dia berkirin surat terbuka kepada pemimpin dunia sebagaimana terdapat pada P 88.

Pada P 84 tersebut, SBY secara eksplisit mendorong penyelesaian masalah Laut Tiongkok Selatan melalui konsultasi langsung dengan negara terkait dan jalan damai. Demikian pula pada P 85, SBY pun telah berikhtiar ikut menciptakan perdamaian. Jalan yang ditempuhnya adalah meningkatkan persahabatan dengan negar-negara di Pasifik Barat Daya.

Paragraf 86 berisi langkah konkret SBY dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan mendorong Traktat Indo-Pasifik untuk Persahabatan dan Kerja Sama agar perdamaian lebih stabil. Langkah ini dipilihnya sebagaimana telah diberlakukan di kawasan Asia Tenggara melalui *Treaty of Amity and Cooperation*.

Dalam hubungannya dengan Palestina, SBY menegaskan bahwa Indonesia bersama

masyarakat internasional lainnya, aktif memperjuangkan hak-hak sah bangsa Palestina. Sikap yang demikian sama dengan sikap presiden-presiden sebelumnya meskipun tidak seluruhnya. Pernah ada pemikiran perlu pemulihan hubungan Indonesia dengan Israel. Bagi SBY, Israel telah melakukan kekerasan yang sungguh tidak proporsional dan tidak berperikemanusiaan.

Penegasan SBY dalam hal ikhtiar ikut mewujudkan perdamaian dunia disajikan juga dalam P 89. Bahkan, pada paragraf ini ada penekanan yang makin kuat. Pada paragraf-paragraf sebelumnya, ikhtiar mewujudkan perdamaian dilakukan secara regional, dalam P 89, ikhtiar itu lebih tinggi lagi tingkatannya, yakni PBB.

Penyelesaian konflik dengan cara damai yang ditempuh sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas dapat dikatakan tidak terkait langsung dengan bangsa Indonesia. Dari sudut pandangan tertentu, mudah dipahami langkah yang ditempuh SBY. Dikatakan demikian karena Indonesia tidak terkait langsung. Namun, ketika terjadi masalah besar yang menimpa TKI, yang berarti masalah itu terkait langsung dengan bangsa Indonesia, SBY pun tetap memilih jalan pendampingan hukum dan melalui surat pribadi, dia permohonan pembebasan, pengurangan atau penundaan hukuman mati.

5) visi ke depan dalam pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka perlindungan terhadap tanah air

Ada kesadaran pada SBY bahwa tantangan di berbagai bidang, terutama bidang keamanan, yang dihadapi pada masa-masa mendatang makin berat. Oleh karena itu, peningkatan pertahanan Indonesia sangat penting. Langkah yang dipikirkannya adalah melakukan peningkatan dan modernisasi kekuatan pertahanan melalui pembangunan kekuatan dasar yang diperlukan. Semua itu disampaikan pada P 95 di bawah ini.

Untuk melindungi tanah air, disamping melalui diplomasi, kita juga terus meningkatkan pertahanan Indonesia. Memasuki awal 2000, kekuatan pertahanan didominasi oleh alutsista yang berumur tua dan daya gempurnya telah menurun jauh. Sementara itu, ke depan, di samping kita harus senantiasa menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, kita juga menghadapi berbagai ancaman keamanan non-tradisional – misalnya bencana alam, bajak laut, terorisme, kejahatan transnasional, serangan *cyber*, penyelundupan manusia, dan lain sebagainya. Karena itulah, kita melakukan peningkatan dan modernisasi kekuatan pertahanan kita melalui program pembangunan Kekuatan Dasar yang Diperlukan (*the minimum essential force*), dengan mengedepankan keterpaduan 3 matra, yaitu darat, laut dan udara (P 95).

6) sikap terhadap berbagai hal

Ada beberapa sikap menonjol yang terdapat dalam pidato SBY dalam menghadapi berbagai masalah, baik di dalam maupun di luar negeri. Di bawah ini dipaparkan sikap-sikap tersebut.

a) santun dan rendah hati

SBY bersikap santun dan rendah hati. Dia mau mengakui dan menghargai prestasi orang lain sekalipun rival politiknya. Di samping itu, dia pun selalu berusaha mencapai yang lebih baik. Dengan kata lain, dia bukan orang yang bertipe mudah berpuas diri dengan prestasi yang telah dicapainya. Paragraf 13 dan 49 yang disajikan di bawah ini berisi sikapnya yang demikian dan sikap tersebut dinyatakan secara eksplisit.

Kita mengatakan semua capaian ini tidak untuk berpuas diri atau menepuk dada. Kita mengatakan ini untuk mengingatkan diri bahwa semua ini berawal dari revolusi 1945 yang dirintis para pendiri republik. Perjalanan kita sebagai bangsa sudah cukup panjang, dan terlepas dari berbagai permasalahan yang masih ada, serta segala kekurangan kita, sejarah menunjukkan bahwa perjuangan dan kerja keras bangsa Indonesia selama ini telah mengangkat derajat bangsa kita ke tingkat yang lebih tinggi (P 13).

Namun, sekali lagi, kita tidak boleh berpuas diri dan takabur melihat semua ini. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa kita masih banyak. Pekerjaan rumah kita tidak sedikit. Salah satu tantangan terbesar kita adalah bagaimana mengubah nasib puluhan juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah atau di sekitar garis kemiskinan, ke arah yang lebih sejahtera (P 49).

b) mensyukuri prestasi

SBY mensyukuri prestasi yang dicapainya. Rasa syukurnya mencerminkan bahwa dia seorang muslim. Hal itu ditandai dengan ungkapan-ungkapan islami yang digunakannya, kefasihan mengucapkan ungkapan tersebut, dan amalan ibadah seperti salat, puasa, dan haji. Paragraf 18 dan 19 berisi sikapnya mensyukuri keadaan dan prestasi yang dicapainya.

Kita patut bersyukur bahwa, sejak bergulirnya reformasi, demokrasi kita terus tumbuh semakin kuat. Sebenarnya, dalam konteks realitas dunia sekarang, ini merupakan hal yang langka terjadi. Di berbagai belahan dunia, kita melihat berbagai contoh transisi demokrasi yang mengalami stagnasi, menjadi layu dan bahkan akhirnya runtuh. Dunia juga bertaburan dengan contoh transisi demokrasi yang kerap dirundung konflik, instabilitas dan kemunduran ekonomi. Jelas, transisi demokrasi adalah suatu proses yang penuh risiko dan tantangan (P 18).

Alhamdulillah, dengan ridho Allah SWT, dan dengan kerja keras kita semua, pembangunan demokrasi kita berjalan relatif baik. Dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali melakukan pemilu secara teratur dan damai. Dan dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali mengalami pergantian Pemerintah secara konstitusional dan damai pula (P 19).

c) arif dalam menghadapi gugatan hasil pilpres

Sikapnya dalam menghadapi hasil pemilihan presiden (pilpres) 2014, merupakan salah satu bukti bahwa dia orang yang arif. Pilpres tersebut berujung pada pengajuan gugatan pasangan Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan tersebut menilai

terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam pilpres. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah pemenang pilpres. Ketika menunggu putusan MK, beginilah sikap SBY.

Yang penting, marilah kita semua bekerja sama untuk terus mengawal proses ini agar berlangsung secara konstitusional dan damai, serta selalu mengedepankan kepentingan dan masa depan rakyat Indonesia. Sama seperti sebelumnya, proses pemilu 2014 ini harus benar-benar menyuarakan nurani rakyat, dan bukan semata pertarungan elit politik. Saya yakin inilah yang paling diharapkan oleh rakyat kita pada saat ini (P 23).

Dalam P 23, SBY bersikap tidak memihak salah satu di antara kedua pasangan itu. Dia mengajak agar semua pihak mengawal proses pilpres berlangsung secara konstitusional, damai, dan mengedepankan kepentingan dan masa depan rakyat Indonesia.

Dari pembahasan data tersebut diketahui bahwa pidato SBY memenuhi syarat sebagai wacana. Pidato tersebut berstruktur yang cukup teratur. Pidato itu terdiri atas tiga bagian besar, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Ketiga bagian besar itu saling mendukung. Di samping terdiri atas tiga bagian besar yang demikian, pidato itu dilengkapi dengan sapaan kepada audiensi, baik pada bagian awal, tengah, maupun akhir. Semua bagian itu berfungsi membentuk satu kesatuan yang utuh.

2. Penggunaan Bahasa Indonesia

Di bawah ini disajikan pembahasan penggunaan tuturan (a) tuturan repetisi, hiperbola, eufemisme, metafora, sinekdoke, perumpamaan, personifikasi, dan oksimoron; (b) ejaan, (c) kata, dan (d) kalimat.

a. tuturan repetisi, hiperbola, eufemisme, metafora, perumpamaan, personifikasi, dan oksimoron

Tuturan yang digunakan oleh SBY dalam pidatonya yang dibahas dalam penelitian ini terdiri atas tuturan repetisi, hiperbola, eufemisme, metafora, perumpamaan, personifikasi, dan oksimoron.

b. Tuturan repetisi

Tuturan repetisi dalam pidato SBY sebagaimana terdapat pada P 8, 9, dan 10 menimbulkan efek penekanan isi. Ketiga kalimat itu diawali dengan kata-kata yang sama, yakni *dari bangsa yang*. Lebih-lebih lagi, ada pengontraskan isi pada kalimat. Dalam P 8 K 1 terdapat pengontraskan *sewaktu merdeka sebagian besar penduduknya buta huruf*, dengan *kini mempunyai sistem pendidikan yang kuat dan luas, yang mencakup lebih dari 200 ribu sekolah, 3 juta guru dan 50 juta siswa*. Dalam kalimat P 9 K 2 terdapat pengontraskan *tadinya terbelakang di Asia*, dengan

telah naik menjadi middle-income country, menempati posisi ekonomi ke-16 terbesar dunia, dan bahkan menurut Bank Dunia telah masuk dalam 10 besar ekonomi dunia jika dihitung dari purchasing power parity. Dalam P 10 K 1 terdapat pula pengontrasan antara seluruh penduduknya miskin di tahun 1945, dan Indonesia di abad ke-21 mempunyai kelas menengah terbesar di Asia Tenggara – dan salah satu negara dengan pertumbuhan kelas menengah yang tercepat di Asia.

Dalam P 12 dan 19 terdapat repetisi juga. Kata yang diulang pada P 12 adalah *semakin*, sedangkan pengulangan pada P 19 terdapat frasa *dalam 15 tahun terakhir ini*. Pengulangan pada kata *semakin* memberikan efek penekanan bahwa *kedamaian, kemakmuran, dan kedemokratisan* sebagaimana disebutkan secara serial dalam paragraf itu bertambah baik kualitasnya. Pengulangan pada frasa *dalam 15 tahun terakhir ini* memberikan efek penekanan pada waktu. Bagi SBY, waktu 15 tahun terakhir ini sangat penting dalam hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan umum dan hasilnya.

Masih ada lagi paragraf-paragraf lain (misalnya P 28 dan 29) yang di dalamnya terdapat repetisi. Dalam P 28 repetisi terdapat pada *keadilan*. Repetisi pada kata itu sangat tepat karena keadilan merupakan salah satu dari tiga titik berat pembangunan sebagaimana disampaikan pada P 16. Bahkan, untuk memberikan penekanan, dalam P 28 s.d. 39 diuraikan masalah penegakan keadilan. Repetisi pada P 29 terdapat pada kata *panglima*. Efek yang ditimbulkan adalah penekanan juga. Dalam pengertian umum *panglima* adalah pemimpin pasukan; pemimpin kesatuan tentara. Sebagai pemimpin pasukan, ia memegang tongkat komando. Dia mempunyai kekuasaan dan kekuatan mengarahkan dan memerintah. Dialah yang mengarahkan dan memerintah. Apa pun yang diarahkan dan diperintahkan oleh panglima wajib ditaati. Dalam paragraf itu, dinyatakan bahwa pada masa lalu (masa Orde Lama—peneliti) politik menjadi panglima. Hal ini berarti bahwa bangsa dan pemerintah Indonesia tunduk pada kepentingan politik. Pada masa berikutnya (masa Orde Baru—peneliti) ekonomi menjadi panglima. Pada masa ini, ekonomilah yang berkuasa. Kemudian, pada masa selanjutnya (masa Orde Reformasi—peneliti) dinyatakan bahwa hukum menjadi panglima. Pendek kata, repetisi pada *panglima* memberikan efek bahwa pada masa Orde Lama, politiklah yang berkuasa. Dengan kata lain, kekuasaan ada pada politik. Pada masa Orde Baru, ekonomilah yang berkuasa. Artinya, kepentingan ekonomi menjadi penentu segalanya. Pada masa Orde Reformasi, hukumlah yang berkuasa. Semua aspek kehidupan, harus diatur berdasarkan hukum dan tunduk pada hukum.

c. Tuturan hiperbola

Dalam pidato SBY terdapat penggunaan bahasa yang menyatakan sesuatu yang bersifat berlebihan atau melebih-lebihkan. Penggunaan bahasa yang demikian disebut hiperbola. Misalnya, dalam P 9 dinyatakan *Dari bangsa yang tadinya terbelakang di Asia, Indonesia telah naik menjadi middle-income country, menempati posisi ekonomi ke-16 terbesar dunia, dan bahkan menurut Bank Dunia telah masuk dalam 10 besar ekonomi dunia jika dihitung dari purchasing power parity. Kalimat tersebut berisi pernyataan dua keadaan yang kontras. Pada bagian awal kalimat tersebut dinyatakan bahwa bangsa Indonesia ketika merdeka dalam keadaan sangat tertinggal, bahkan terbelakang di Asia, tetapi pada saat kepemimpinan SBY, mengalami kemajuan yang luar biasa, yakni menempati posisi ekonomi ke-16 terbesar dunia. Pernyataan itu berlebihan. Dikatakan demikian karena dari segi pengontrasannya ada kesenjangan masa, yaitu masa ketika baru merdeka setelah dijajah Belanda dan Jepang dalam waktu yang sangat lama dikontraskan dengan keadaan tahun 2014. Namun, tuturan yang demikian efektif sebagai bahasa pidato presiden. Dengan bahasa itu, audiensi diyakinkan agar optimistis bahwa kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia selama kepemimpinannya sangat bermakna.*

Tidak berbeda halnya P 10. Dalam paragraf itu SBY menyatakan Dari bangsa yang seluruh penduduknya miskin di tahun 1945, Indonesia di abad ke-21 mempunyai kelas menengah terbesar di Asia Tenggara – dan salah satu negara dengan pertumbuhan kelas menengah yang tercepat di Asia. Paragraf itu pun hiperbolis karena menyatakan isi yang melebih-lebihkan. Dinyatakan dalam paragraf itu bahwa pada 1945, seluruh penduduk bangsa Indonesia miskin. Pernyataan itu dilebih-lebihkan. Berapa pun jumlahnya pada masa sebelum merdeka pasti ada orang Indonesia yang kaya. Demikian juga pernyataan bahwa Indonesia mempunyai kelas menengah terbesar di Asia Tenggara dan salah satu negara dengan pertumbuhan kelas menengah yang tercepat di Asia. Meskipun demikian, tuturan yang tersebut memang lazim digunakan oleh presiden negara mana pun sebab presiden mempunyai kewajiban moral membuat rakyatnya tenang dan optimistis meskipun dengan risiko ditentang atau dicemooh oleh lawan politiknya.

Hiperbola terdapat pula pada P 29. Bahkan, dalam paragraf itu, terdapat pernyataan yang absurd, yakni *Ini berarti tidak ada satupun warga negara Indonesia yang berada di luar*

jangkauan hukum atau di atas hukum. Ini juga berarti tidak ada satupun kelompok masyarakat kita yang berhak main hakim sendiri atau memaksakan pendapatnya pada pihak lain. Dinyatakan absurd karena tidak hanya satu orang yang lepas dari jeratan hukum, padahal seharusnya terjerat hukum.

d. Tuturan eufemisme

Pidato SBY mencerminkan sikap kesantunannya. Dia memang terkenal sebagai orang yang sangat santun. Kesantunannya tampak pada, misalnya, dalam P 13 K2 dan P 14 K 1 dia menyatakan bahwa kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia tidak semata-mata merupakan hasil kerjanya selaku presiden, tetapi juga perjuangan pada pendahulunya. Tuturan itu menimbulkan efek bahwa SBY bukan orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Karena dalam tuturannya dia menyebut Megawati termasuk presiden yang berperan penting juga, tuturan itu pun dapat dimaknai sebagai ikhtiar SBY *merangkul* lawan politiknya. Dengan cara ini, diharapkan pemerintahannya mendapat dukungan politis. Itulah efek yang ditimbulkan dari eufemisme dalam pidatonya.

e. Tuturan metafora

Tidak banyak tuturan metafora yang terdapat dalam pidato SBY. Tuturan itu terdapat pada P 6 K 1, yakni *generasi emas*. *Emas* telah dipahami secara internasional merupakan sesuatu yang sangat berharga. Di bidang pertandingan atau lomba di bidang olahraga dan seni, medali emas merupakan penghargaan tertinggi. Dengan demikian, generasi emas merupakan generasi yang sangat berharga; generasi yang sangat baik. Efek penggunaan tuturan itu adalah timbulnya keoptimisan pada audiensi. Jika generasi sekarang belum dapat merasakan kesejahteraan lahir batin karena kalah bersaing dengan bangsa lain, masih ada harapan pada masa mendatang lahir generasi yang berprestasi lebih hebat daripada generasi bangsa lain sehingga mendapat penghargaan terbaik atau tertinggi.

f. Tuturan perumpamaan

Sangat sedikit tuturan perumpamaan yang terdapat dalam pidato SBY. Dalam P 34 K 2 terdapat tuturan *Tugas Satgas ini adalah mencegah agar jangan sampai hukum diperjualbelikan layaknya suatu komoditi untuk memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan pemerintah, dan untuk pula melindungi pelaku kejahatan*. Kata *layaknya* merupakan salah satu penanda formal tuturan perumpamaan. Penggunaan tuturan itu menimbulkan efek pada audiensi timbulnya gambaran konkret bahwa penegakan hukum harus betul-betul dilakukan. Tidak boleh terjadi penegakan hukum berakhir melalui *transaksi seperti jual beli suatu barang komoditas*.

Misalnya, ada pihak yang terkena perkara hukum, tetapi karena mempunyai uang, dia mau membayar berapa pun yang diminta petugas penegak hukum agar terhindar dari jeratan hukum atau memperoleh hukuman yang lebih ringan daripada yang seharusnya. Bahkan, dia pun dapat menawar. Dengan demikian, tuturan itu mengongretkan hal yang dibicarakan, yakni penegakan hukum tidak boleh dilakukan seperti orang melakukan transaksi jual beli suatu komoditas.

g. Tuturan personifikasi

Tuturan personifikasi terdapat dalam P 18 K 1 dan 4; P 23 K 2; dan P 29 K2. Dalam P 18 K 1 tuturan [...] *sejak bergulirnya reformasi, demokrasi kita terus tumbuh semakin kuat reformasi diperlakukan seperti orang, yakni bergerak.* Dalam K 4, tuturan [...] *transisi demokrasi yang kerap dirundung konflik, instabilitas dan kemunduran ekonomi transisi demokrasi diperlakukan seperti orang, yaitu dirundung konflik, instabilitas dan kemunduran ekonomi.* Tuturan *proses pemilu 2014 ini harus benar-benar menyuarakan nurani rakyat, dan bukan semata pertarungan elit politik* merupakan tuturan personifikasi. Dikatakan demikian karena proses pemilu 2014 diperlakukan seperti orang, yaitu *dapat menyuarakan nurani rakyat dan bukan pertarungan elit politik.* Dalam P 29 K1, terdapat tuturan *Keadilan akan makin tegak dan kuat apabila supremasi hukum ditegakkan secara konsisten.* Dalam tuturan itu, *keadilan* diperlakukan seperti orang, yakni *makin tegak dan kuat.* Dalam P 29 K 2 terdapat tuturan [...] *politik pernah menjadi panglima, dan kemudian ekonomi menjadi panglima, maka dalam era reformasi, hukumlah yang kita jadikan panglima.* Tuturan *panglima* dalam penggunaan bahasa biasa merupakan jabatan di dalam tentara yang mempunyai tugas memimpin pasukan atau kesatuan tentara.

Penggunaan tuturan personifikasi itu mempunyai efek mengongretkan gagasan yang disampaikan SBY. Audiensi memperoleh gambaran konkret mengenai hal-hal yang dimaksudkan oleh SBY dalam pidatonya.

h. Tuturan oksimoron

Tuturan oksimoron dalam pidato SBY terdapat dalam P 25 K 3. Dalam paragraf dan kalimat itu, terdapat tuturan *Sekalipun berbeda namun keduanya sama pentingnya.* Ada penegakan atau pendirian suatu hubungan sintaktis dalam kalimat itu yang bersifat determinasi. Tuturan itu dapat direkonstruksi dengan memperhatikan tuturan sebelumnya, yaitu *Disini perlu kita bedakan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif.* Dengan demikian, tuturan *Sekalipun berbeda namun keduanya sama pentingnya* secara lengkapnya adalah *Sekalipun berbeda, demokrasi prosedural dan demokrasi substantif sama pentingnya.*

Ditinjau dari segi substansi, pidato SBY berisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan,

pertahanan dan keamanan, pendidikan, dan agama. Ditinjau dari segi fungsinya, pidato itu secara dominan berfungsi mempengaruhi audiensi agar optimistis menghadapi berbagai tantangan. Sangat sedikit pengakuan akan kekurangan apalagi kegagalan pemerintahan SBY. Bahkan, ketika secara implisit mengakui masih banyaknya rakyat miskin, SBY mengemukakan penderitaan rakyat Palestina sebagai perbandingan. Tidak ada satu kalimat pun yang mengajak audiensi untuk memahami ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa yang usianya lebih muda atau sama, tetapi lebih maju (misalnya, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, lebih-lebih Jepang).

Tuturan-tuturan sebagaimana dibahas pada VI.B.1.a efektif sebagai bahasa pidato kenegaraan presiden. Pidato tersebut merupakan pidato politik. Oleh karena itu, piranti kebahasaan seperti repetisi, paralelisme, dan metafora sebagaimana dikemukakan oleh Talbot, Atkinson & Atkinson yang dijelaskan Kweldju (2008: 5) dan dijadikan rujukan dalam penelitian ini digunakan oleh SBY. Demikian pula penggunaan ungkapan-ungkapan ekspresif dan puitis terdapat dalam pidato tersebut. Piranti eufemisme, narasi ideologis dalam membentuk apa yang benar, indah, dan baik bagi negara sebagaimana dikemukakan oleh Taylor (2007) dalam Kweldju (2008: 5-6) juga digunakan oleh SBY. Sementara itu, dilihat dari sudut pandangan ragam tinggi, bahasa pidato SBY bergengsi tinggi, lebih beradab, dan lebih indah. Tidak ada ungkapan yang bernada menghasut, mengobarkan rasa permusuhan, apalagi membakar emosi rakyat Indonesia untuk memerangi bangsa lain. Ciri yang demikian sesuai dengan pendapat Moeliono (1981: 86) dan Wardhaugh (1992: 91) sebagaimana telah dipaparkan pada wacana ilmiah dan ragam bahasa Indonesia dalam pidato resmi penelitian ini. Hal penting lainnya yang perlu dipaparkan juga di sini adalah akibat penggunaan bahasa pidato SBY. Audiensi tidak sekadar memperoleh informasi, tetapi “menikmati” bahasa. Persuasi yang dilakukan oleh SBY melalui bahasa yang digunakannya cukup efektif, terutama dalam ikhtiar mewujudkan perdamaian dunia.

SIMPULAN DAN SARAN

Struktur wacana Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014 terdiri atas tiga bagian utama, yakni (1) pendahuluan, (2) inti, dan (3) penutup. Ketiga bagian utama itu merupakan satu kesatuan utuh. Di samping tiga bagian utama itu, wacana pidato itu dilengkapi dengan judul, ucapan basmalah, salam pembuka, dan sapaan kepada audiensi. Setelah inti, disampaikan pengantar penutup pidato, sapaan kepada audiensi, ucapan salam penutup, ucapan terima kasih,

tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyampaian pidato, dan identitas yang berpidato.

Dari segi penggunaan bahasa Indonesia, dalam pidato itu digunakan bahasa Indonesia yang berfungsi secara cukup efektif sebagai sarana retorika presiden. Tuturan repetisi, hiperbola, eufemisme, tuturan metafora, perumpamaan, personifikasi, dan oksimoron yang digunakan dapat mengungkapkan secara ekspresif pemikiran dan perasaan SBY sebagai presiden, yang berikhtiar memersuasi audiensi. Ada ungkapan-ungkapan yang indah dan santun sehingga audiensi tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga merasakan keindahan bahasa. Tidak terdapat ungkapan-ungkapan kasar, apalagi yang bernada provokatif meskipun digunakan untuk menyatakan ketidaksenangan atau kekecewaan. Sementara itu, dari sudut pandangan ragam wacana, disimpulkan bahwa pidato SBY dapat dikategorikan ke dalam wacana ilmiah populer karena dari aspek penerapan kaidah linguistis bersifat agak longgar. Ada ungkapan asing yang digunakan, tetapi sangat terbatas. Hal ini berarti bahwa SBY berusaha melaksanakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III Pasal 28.

Wacana Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014 dapat dijadikan salah satu model pidato pejabat publik. Tentu saja, masih ada yang perlu disempurnakan, terutama dari segi penggunaan bahasa Indonesia.

Konseptor pidato bagi pejabat publik perlu lebih menguasai kaidah bahasa Indonesia agar teks yang disiapkannya lebih baik. Dengan demikian, khalayak dapat mencontoh penggunaan bahasa Indonesia untuk berbidato di depan khalayak.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan, Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa, dan Anton M. Moeliono. 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ahmadi, Mukhsin. 1990. *Dasar-Dasar Komposisi Bahasa Indonesia*. Malang: YA3.
- Fairclough, Norman. 2010. *Critical Discourse Analysis*. London: Longman Group Limited.
- Holmes, Janet. 1992. *An Introduction to Sociolinguistics*. London and New York: Longman.
- Junus, Umar. 1989. *Stilistik: Suatu Pengantar*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Keraf, Gorys. 2001. *Komposisi*. Ende Flores: Nusa Indah.
- Kuntha Ratna, Nyoman. 2009. *Stilistika: Kajian Puitika Bahasa, Sastra, dan Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kweldju, Siusana. 2008. "Retorika Dua Presiden yang Berbeda dari Dua Negera yang Berbeda di Jaman yang Sama" makalah dalam Pertemuan Linguistik 12 dan 14 Agustus 2008. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Moeliono, Anton M. 1981. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Pradopo, Rahmat Joko. 1996. "Stilistika." (Handout). Yogyakarta: Program Studi Sastra Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- S. Luhukay, Marsefio. 2007. "Presiden SBY dan Politik Pencitraan: Analisis Teks Pidato Presiden SBY dengan Pendekatan Retorika Aristoteles". Dalam *Scriptura*. Vol.1 No.2 Juli 2007. hlm. 51-70.
- The Liang Gie (ed). 1985. *Kemajuan Studi*. Yogyakarta: Pusat Kemajuan Studi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- Wardhaugh, Ronald. 1993. *An Introduction to Sociolinguistics. Second Edition*. Cambridge USA: Blackwell.